

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desaserta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
PENETAPAN DESA

Pasal 1

- (1) Dengan peraturan daerah ini, ditetapkan keberadaan desa di Kabupaten Ponorogo.
- (2) Daftar nama desa di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Nopember 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,

TTD.

MASKUR

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-08-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

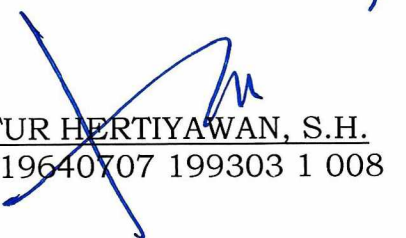
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 360-12/2015/2015

Ponorogo, 11 AUG 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah menetapkan desa yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan desa di Kabupaten Ponorogo dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, yang memerlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 NOPEMBER 2015

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN PONOROGO

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	NAMA DESA	NOMOR KODE KECAMATAN DAN DESA
1	2	3	4	5
I.	Slahung	22	1. Tugurejo 2. Senepo 3. Slahung 4. Caluk 5. Broto 6. Menggare 7. Kambeng 8. Wates 9. Ngilo-Ilo 10. Duri 11. Ngloning 12. Plancungan 13. Jebeng 14. Galak 15. Truneng 16. Simo 17. Crabak 18. Mojopitu 19. Gundik 20. Nailan 21. Gombang 22. Janti	35.02.01 35.02.01.2001 35.02.01.2002 35.02.01.2003 35.02.01.2004 35.02.01.2005 35.02.01.2006 35.02.01.2007 35.02.01.2008 35.02.01.2009 35.02.01.2010 35.02.01.2011 35.02.01.2012 35.02.01.2013 35.02.01.2014 35.02.01.2015 35.02.01.2016 35.02.01.2017 35.02.01.2018 35.02.01.2019 35.02.01.2020 35.02.01.2021 35.02.01.2022
II.	Ngrayun	11	1. Wonodadi 2. Sendang 3. BaosanKidul 4. Binade 5. Mrayan 6. BaosanLor	35.02.02 35.02.02.2001 35.02.02.2002 35.02.02.2003 35.02.02.2004 35.02.02.2005 35.02.02.2006

1	2	3	4	5
			7. Temon 8. Selur 9. Ngrayun 10. Cepoko 11. Gedangan	35.02.02.2007 35.02.02.2008 35.02.02.2009 35.02.02.2010 35.02.02.2011
III.	Bungkal	19	1. Pelem 2. Koripan 3. Bekare 4. Nambak 5. Kalisat 6. Munggu 7. Pager 8. Belang 9. Bungkal 10. Ketonggo 11. Kunti 12. Bancar 13. Padas 14. Bungu 15. Kupuk 16. Sambilawang 17. Kwajon 18. Bediwetan 19. Bedikulon	35.02.03 35.02.03.2001 35.02.03.2002 35.02.03.2003 35.02.03.2004 35.02.03.2005 35.02.03.2006 35.02.03.2007 35.02.03.2008 35.02.03.2009 35.02.03.2010 35.02.03.2011 35.02.03.2012 35.02.03.2013 35.02.03.2014 35.02.03.2015 35.02.03.2016 35.02.03.2017 35.02.03.2018 35.02.03.2019
IV.	Sambit	16	1. Gajah 2. Wringinanom 3. Ngadisanan 4. Maguwan 5. Nglewan 6. Bedingin 7. Bancangan 8. Campurejo 9. Campursari 10. Bulu 11. Sambit	35.02.04 35.02.04.2001 35.02.04.2002 35.02.04.2003 35.02.04.2004 35.02.04.2005 35.02.04.2006 35.02.04.2007 35.02.04.2008 35.02.04.2009 35.02.04.2010 35.02.04.2011

1	2	3	4	5
			12. Besuki 13. Wilangan 14. Bangsalan 15. Kemuning 16. Jrasah	35.02.04.2012 35.02.04.2013 35.02.04.2014 35.02.04.2015 35.02.04.2016
V.	Sawoo	14	1. Tumpuk 2. Pangkal 3. TumpakPelem 4. Tempuran 5. Sriti 6. Temon 7. Sawoo 8. Prayungan 9. Tugurejo 10. Grogol 11. Ketrol 12. Kori 13. Bondrang 14. Ngindeng	35.02.05 35.02.05.2001 35.02.05.2002 35.02.05.2003 35.02.05.2004 35.02.05.2005 35.02.05.2006 35.02.05.2007 35.02.05.2008 35.02.05.2009 35.02.05.2010 35.02.05.2011 35.02.05.2012 35.02.05.2013 35.02.05.2014
VI.	Sooko	6	1. Ngadirojo 2. Klepu 3. Suru 4. Sooko 5. Bedoho 6. Jurug	35.02.06 35.02.06.2001 35.02.06.2002 35.02.06.2003 35.02.06.2004 35.02.06.2005 35.02.06.2006
VII.	Pulung	18	1. Karangpatihan 2. Tegalrejo 3. Bedrug 4. WagirKidul 5. Singgahan 6. Patik 7. Pulung 8. PulungMerdiko 9. Sidoharjo	35.02.07 35.02.07.2001 35.02.07.2002 35.02.07.2003 35.02.07.2004 35.02.07.2005 35.02.07.2006 35.02.07.2007 35.02.07.2008 35.02.07.2009

1	2	3	4	5
			10. Wotan 11. Plunturan 12. Pomahan 13. Kesugihan 14. Serag 15. Wayang 16. Munggung 17. Bekiring 18. Banaran	35.02.07.2010 35.02.07.2011 35.02.07.2012 35.02.07.2013 35.02.07.2014 35.02.07.2015 35.02.07.2016 35.02.07.2017 35.02.07.2018
VIII.	Mlarak	15	1. Tugu 2. Candi 3. Totokan 4. Ngrukem 5. Siwalan 6. Joresan 7. Nglumpang 8. Gontor 9. Gandu 10. Jabung 11. Bajang 12. Mlarak 13. Serangan 14. Suren 15. Kaponan	35.02.08 35.02.08.2001 35.02.08.2002 35.02.08.2003 35.02.08.2004 35.02.08.2005 35.02.08.2006 35.02.08.2007 35.02.08.2008 35.02.08.2009 35.02.08.2010 35.02.08.2011 35.02.08.2012 35.02.08.2013 35.02.08.2014 35.02.08.2015
IX.	Jetis	14	1. Ngasinan 2. KutuKulon 3. KutuWetan 4. Kradenan 5. Mojomati 6. Coper 7. Mojorejo 8. Karanggebang 9. Jetis 10. Tegalsari 11. Wonoketro	35.02.09 35.02.09.2001 35.02.09.2002 35.02.09.2003 35.02.09.2004 35.02.09.2005 35.02.09.2006 35.02.09.2007 35.02.09.2008 35.02.09.2009 35.02.09.2010 35.02.09.2011

1	2	3	4	5
			12. Josari 13. Turi 14. Winong	35.02.09.2012 35.02.09.2013 35.02.09.2014
X.	Siman	16	1. Demangan 2. Ngabar 3. Madusari 4. Beton 5. Sekaran 6. Brahu 7. Kepuhrubuh 8. Sawuh 9. Jarak 10. Tranjang 11. Pijeran 12. Manuk 13. Siman 14. PatihanKidul 15. Ronosentanan 16. Tajug	35.02.10 35.02.10.2001 35.02.10.2002 35.02.10.2003 35.02.10.2004 35.02.10.2005 35.02.10.2006 35.02.10.2007 35.02.10.2008 35.02.10.2009 35.02.10.2010 35.02.10.2011 35.02.10.2012 35.02.10.2013 35.02.10.2014 35.02.10.2015 35.02.10.2016
XI.	Balong	20	1. Pandak 2. BuluKidul 3. Bulak 4. Ngendut 5. Karangpatihan 6. Sumberejo 7. Ngumpul 8. Ngraket 9. Dadapan 10. Singkil 11. Karangan 12. Bajang 13. Balong 14. Jalen 15. Karangmojo 16. Sedarat	35.02.11 35.02.11.2001 35.02.11.2002 35.02.11.2003 35.02.11.2004 35.02.11.2005 35.02.11.2006 35.02.11.2007 35.02.11.2008 35.02.11.2009 35.02.11.2010 35.02.11.2011 35.02.11.2012 35.02.11.2013 35.02.11.2014 35.02.11.2015 35.02.11.2016

1	2	3	4	5
			17. Purworejo 18. Tatung 19. Muneng 20. Ngampel	35.02.11.2017 35.02.11.2018 35.02.11.2019 35.02.11.2020
XII.	Kauman	16	1. Tegalombo 2. Nongkodono 3. Sukosari 4. Ngrandu 5. Nglarangan 6. Bringin 7. Pengkol 8. Gabel 9. Ciluk 10. Semanding 11. Tosanan 12. Maron 13. Somoroto 14. Plosojenar 15. Carat 16. Kauman	35.02.12 35.02.12.2001 35.02.12.2002 35.02.12.2003 35.02.12.2004 35.02.12.2005 35.02.12.2006 35.02.12.2007 35.02.12.2008 35.02.12.2009 35.02.12.2010 35.02.12.2011 35.02.12.2012 35.02.12.2013 35.02.12.2014 35.02.12.2015 35.02.12.2016
XIII.	Badegan	10	1. Dayakan 2. Karangan 3. Tanjunggunung 4. Karangjoho 5. Tanjungrejo 6. Bandaralim 7. Kapuran 8. Watubonang 9. Biting 10. Badegan	35.02.13 35.02.13.2001 35.02.13.2002 35.02.13.2003 35.02.13.2004 35.02.13.2005 35.02.13.2006 35.02.13.2007 35.02.13.2008 35.02.13.2009 35.02.13.2010
XIV.	Sampung	12	1. Sampung 2. Pohijo 3. Jenangan 4. Nglurup	35.02.14 35.02.14.2001 35.02.14.2002 35.02.14.2003 35.02.14.2004

1	2	3	4	5
			5. Tulung 6. Carangrejo 7. Pagerukir 8. Kunti 9. Glinggang 10. Gelangkulon 11. Karangwaluh 12. Ringinputih	35.02.14.2005 35.02.14.2006 35.02.14.2007 35.02.14.2008 35.02.14.2009 35.02.14.2010 35.02.14.2011 35.02.14.2012
XV.	Sukorejo	18	1. Sukorejo 2. Bangunrejo 3. Sidorejo 4. Nambangrejo 5. Lengkong 6. GelangLor 7. Serangan 8. Nampan 9. Kranggan 10. Golan 11. Prajegan 12. Kedungbanteng 13. KarangloLor 14. Gegeran 15. Gandukepuh 16. Kalimalang 17. Sragi 18. Morosari	35.02.15 35.02.15.2001 35.02.15.2002 35.02.15.2003 35.02.15.2004 35.02.15.2005 35.02.15.2006 35.02.15.2007 35.02.15.2008 35.02.15.2009 35.02.15.2010 35.02.15.2011 35.02.15.2012 35.02.15.2013 35.02.15.2014 35.02.15.2015 35.02.15.2016 35.02.15.2017 35.02.15.2018
XVI.	Babadan	12	1. Cekok 2. Japan 3. Gupolo 4. Polorejo 5. Bareng 6. Ngunut 7. Sukosari 8. Lembah 9. Pondok	35.02.16 35.02.16.2002 35.02.16.2004 35.02.16.2006 35.02.16.2007 35.02.16.2008 35.02.16.2009 35.02.16.2010 35.02.16.2011 35.02.16.2012

1	2	3	4	5
			10. Babadan 11. Purwosari 12. Trisono	35.02.16.2013 35.02.16.2014 35.02.16.2015
XVII.	Jenangan	15	1. Mrican 2. Plalangan 3. Nglayang 4. Jenangan 5. Jimbe 6. Ngrupit 7. Pintu 8. Sedah 9. Panjeng 10. Sraten 11. Semanding 12. Tanjungsari 13. Paringan 14. Wates 15. Kemiri	35.02.18 35.02.18.2003 35.02.18.2004 35.02.18.2005 35.02.18.2006 35.02.18.2007 35.02.18.2008 35.02.18.2009 35.02.18.2010 35.02.18.2011 35.02.18.2012 35.02.18.2013 35.02.18.2014 35.02.18.2015 35.02.18.2016 35.02.18.2017
XVIII.	Ngebel	8	1. Ngrogung 2. Sahang 3. WagirLor 4. Talun 5. Gondowido 6. Pupus 7. Ngebel 8. Sempu	35.02.19 35.02.19.2001 35.02.19.2002 35.02.19.2003 35.02.19.2004 35.02.19.2005 35.02.19.2006 35.02.19.2007 35.02.19.2008
XIX.	Jambon	13	1. Jonggol 2. Poko 3. Sendang 4. Bringinan 5. KarangloKidul 6. Krebet 7. BuluLor 8. Jambon	35.02.20 35.02.20.2001 35.02.20.2002 35.02.20.2003 35.02.20.2004 35.02.20.2005 35.02.20.2006 35.02.20.2007 35.02.20.2008

1	2	3	4	5
			9. Blembem 10. Pulosari 11. Menang 12. Srandil 13. Sidoharjo	35.02.20.2009 35.02.20.2010 35.02.20.2011 35.02.20.2012 35.02.20.2013
XX.	Pudak	6	1. Bareng 2. Tambang 3. Krisik 4. PudakWetan 5. Banjarejo 6. PudakKulon	35.02.21 35.02.21.2001 35.02.21.2002 35.02.21.2003 35.02.21.2004 35.02.21.2005 35.02.21.2006

Pj. BUPATI PONOROGO,
TTD.
MASKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008